

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.05.2.409202/2019  
I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode>Nama Satker : (409202) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Kuasa Pengguna Anggaran : SOFYAN  
Bendahara Pengeluaran : ASRIANI  
Pejabat Penanda tangan SPM : SISMOLO

Halaman : IA . 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		670.560.000
Sub Fungsi	03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN		670.560.000
2 Program	013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan		670.560.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan		
	02	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri		
	03	Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan		
Indikator Kinerja Program	01.01	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan	90 Persen	
	02.01	Persentase Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan yang Berdaya Guna Setelah Bebas	15,2 Persen	
	03.01	Menurunnya Persentase Residivis	9,8 Persen	
Output Program	01	Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana		
Indikator Output Program	01	Persentase tahanan yang mendapatkan layanan tahanan sesuai standar	90 Persen	
	02	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan pembinaan narapidana sesuai standar	90 Persen	
	03	Persentase Narapidana/Tahanan/Anak yang mendapatkan layanan perawatan sesuai standar	90 Persen	
	04	Persentase basan baran yang dikelola sesuai standar	90 Persen	
	05	Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	90 Persen	
	06	Persentase Klien yang mendapatkan layanan pembimbingan klien pemasarakatan sesuai standar	90 Persen	
	07	Persentase anak yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengentasan sesuai standar	90 Persen	
Kegiatan	5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		670.560.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasarakatan di wilayah		
Indikator Kinerja Kegiatan	01.01	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar		
Sasaran Kegiatan	02	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar		
Indikator Kinerja Kegiatan	02.01	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar		
	02.02	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar		
	02.03	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar		
	02.04	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi		
Sasaran Kegiatan	03	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar		
Indikator Kinerja Kegiatan	03.01	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar		
Sasaran Kegiatan	04	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar		
Indikator Kinerja Kegiatan	04.01	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar		
	04.02	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar		
	04.03	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar		
	04.04	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN****TAHUN ANGGARAN 2019****NOMOR : DIPA-013.05.2.409202/2019****I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode>Nama Satker : (409202) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Kuasa Pengguna Anggaran : SOFYAN  
Bendahara Pengeluaran : ASRIANI  
Pejabat Penanda tangan SPM : SISMOLO

Halaman : IA . 2

---

Sasaran Kegiatan	05	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	05.01	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar
Sasaran Kegiatan	06	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	06.01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
	06.02	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar
	06.03	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar
Sasaran Kegiatan	07	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	07.01	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar
	07.02	Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar
	07.03	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar
Sasaran Kegiatan	08	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan	08.01	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar
	08.02	ersentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar
Sasaran Kegiatan	09	Layanan Internal (Overhead)
Indikator Kinerja Kegiatan	09.01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemsarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu
	09.02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar
	09.03	Tersediannya data pegawai pemsarakatan sesuai dengan kompetensi
	09.04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
	09.05	Jumlah Kendaraan Bermotor
	09.06	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
	09.07	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
	09.08	Jumlah Gedung/Bangunan
Sasaran Kegiatan	10	Layanan Perkantoran
Indikator Kinerja Kegiatan	10.01	Jumlah Layanan Perkantoran
Sasaran Kegiatan	11	Meningkatnya Kapasitas Hunian
Indikator Kinerja Kegiatan	11.01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemsarakatan Perempuan (LPP)
	11.02	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
	11.03	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemsarakatan (Bapas)
	11.04	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan
Sasaran Kegiatan	12	Terselenggarannya Dukungan Layanan Manajemen Eselon I
Indikator Kinerja Kegiatan	12.01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemsarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu
	12.02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar

---

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.05.2.409202/2019  
I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode>Nama Satker : (409202) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Kuasa Pengguna Anggaran : SOFYAN  
Bendahara Pengeluaran : ASRIANI  
Pejabat Penanda tangan SPM : SISMOLO

Halaman : IA . 3

Indikator Kinerja Kegiatan	12.03	Tersediannya data pegawai pemsarakatan sesuai dengan kompetensi		
	12.04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		
Output Kegiatan	5252.003	Pembinaan UPT Pemsarakatan	11,00 UPT	670.560.000
	5252.003	Pembinaan UPT Pemsarakatan	11,00 UPT	670.560.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase UPT Pemsarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemsarakatan di wilayah sesuai standar	90 %	

Jakarta, 5 Desember 2018  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.

Sri Puguh Budi Utami  
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.05.2.409202/2019  
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasaryakatan  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode>Nama Satker : (409202) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman I B. 1

						Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	670.560.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	670.560.000			(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBPN	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

(Dalam Ribuan)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	RpLN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.05.2.409202/2019  
II. RINCIAN PENGELUARAN  
(RIBUAN RUPIAH)**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode / Nama Satker : (409202) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI  
Kewenangan : (KD)

Halaman II.1

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409202	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	-	670.560	-	-	-	670.560		
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	-	670.560	-	-	-	670.560		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	670.560	-	-	-	670.560		
5252.003	Pembinaan UPT Pemasarakatan	-	670.560	-	-	-	670.560	20.51	
01	RM	-	670.560	-	-	-	670.560	060	
	<b>J U M L A H</b>	-	670.560	-	-	-	670.560		

Jakarta, 5 Desember 2018  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.

Sri Puguh Budi Utami  
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.05.2.409202/2019  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode dan Nama Satker : (409202) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : III.1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409202	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	6.169	13.679	24.006	36.747	38.624	42.916	74.499	72.488	78.590	80.199	89.788	112.855	670.560
		52 BELANJA BARANG	6.169	13.679	24.006	36.747	38.624	42.916	74.499	72.488	78.590	80.199	89.788	112.855	670.560
	013.05.08.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	6.169	13.679	24.006	36.747	38.624	42.916	74.499	72.488	78.590	80.199	89.788	112.855	670.560
		52 BELANJA BARANG	6.169	13.679	24.006	36.747	38.624	42.916	74.499	72.488	78.590	80.199	89.788	112.855	670.560

Jakarta, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.

Sri Puguh Budi Utami  
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.05.2.409202/2019  
IV. A B L O K I R**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode dan Nama Satker : (409202) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV A.1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Sri Puguh Budi Utami  
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.05.2.409202/2019  
IV. B C A T A N**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode dan Nama Satker : (409202) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV B.1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Sri Puguh Budi Utami  
NIP 196207021987032001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : SP DIPA-013.05.2.409202/2019**

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx (2) dan perubahannya

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode/Nama Satker : (409202) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
- Sebesar : Rp. 670.560.000 ( ENAM RATUS TUJUH PULUH JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan  
013.05.08.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 670.560.000  
Rp. 670.560.000

C. Sumber Dana Berasal :

- |                               |     |             |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 670.560.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP                       |     |             | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0           | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0           | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0           | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0           | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
|                               |     |             | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 670.560.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk Ditjen Pemasarakatan, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

DS: 2100-9490-8132-2632

Jakarta, 05 Desember 2018  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001